

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA DI PROVINSI ACEH**

^aHesty Pradita Putri

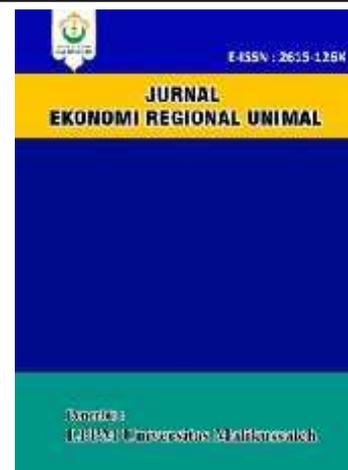
^{*b}Ichsan

^{*}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh*

Corresponding author:

^{*}a hesty.190430135@mhs.unimal.ac.id

^{*}b ichsan@unimal.ac.id



ARTICLE INFORMATION

ABSTRACT

Keywords:

Human Development Index (HDI), Government Spending, Economic Growth, Fiscal Decentralization

This study aims to analyze the effect of government spending, economic growth and fiscal decentralization on the Human Development Index (HDI) in Aceh Province. The data used in this research is secondary data for 2014-2021 accessed from www.bps.go.id. The data analysis method used is panel data regression analysis using Eviews 10 software. The results show that government spending and economic growth partially haveno a significant effect on HDI in Aceh Province. Meanwhile, fiscal decentralization has a positive and significant effect on IHDin Aceh Province. Simultaneously, government spending, economic growth and fiscal decentralization have a positive and significant effect on HDI in Aceh Province. Government Aceh is expected to be more consistent and intensive in increasing the HDI through programs related to economic, health and education aspects.

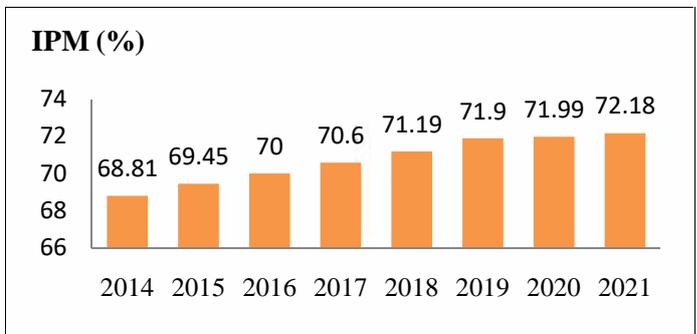
1. PENDAHULUAN

Pembangunan manusia merupakan hal yang mutlak dilakukan guna mencetak sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan pembangunan. Dengan sumber daya manusia yang baik dan memadai maka pelaksanaan pembangunan akan semakin lancar dalam berbagai sektor (Irianto *et al*, 2021). Salah satu cara dalam melihat sumber daya manusia yang berkualitas adalah melalui indeks pembangunan manusia (IPM) yang di manaindikator-indikator pengukurannya adalah umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (BPS, 2020).

Menurut Ginting (2008) di dalam penelitian Setyowati dan Suparwati (2012), sumber daya pembangunan tidak lagi meletakkan prioritas pada kekuatan sumberdayaalam, melainkan pada kekuatan sumber dayamanusia. Dengan demikian, diperlukan strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur dan membuat kebijakan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Pemerintah yang dalam hal ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah, menurut Guritno (2001) yaitu: (1) Peran Stabilisasi, Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. (2) Peran Distribusi, Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapat terdistribusi secara baik dalam masyarakat. (3) Peran Alokasi, Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas.

Provinsi Aceh yang memiliki 23 kabupaten/kota mempunyai beragam potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dengan tingkat IPM yang masih terbilang rendah untuk provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Hal ini menyebabkan capaian pembangunan berbeda di setiap daerahnya. Secara umum kualitas manusia di masing-masing Kabupaten/Kota di Aceh yang diukur melalui nilai IPM pada setiap daerah-daerah memiliki nilai yang relatif tinggi tetapi ada juga yang relatif rendah.

Untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara dengan faktor-faktor tertentu seperti pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan juga desentralisasi fiskal. Untuk lebih jelasnya, menurut data BPS Provinsi Aceh berikut ini adalah IPM di Provinsi Aceh Tahun 2014-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 1.1 IPM Provinsi Aceh Tahun 2014-2021 (Persen)

Secara umum nilai IPM Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan selama 8 tahun terakhir dari tahun 2014 sampai tahun 2021. Nilai IPM Provinsi Aceh pada 2014 yaitu 68,81 persen, hal ini dikarenakan pemerintah Provinsi Aceh pada saat itu belum memberikan perhatian khusus terkait program untuk masyarakat miskin sehingga kualitas penduduk di Provinsi Aceh masih sangat lemah jika dilihat dari fasilitas yang dimiliki. Hal tersebut disebabkan oleh anggaran yang dimiliki pemerintah Aceh belum memfasilitasi pada penyaluran program kemiskinan.

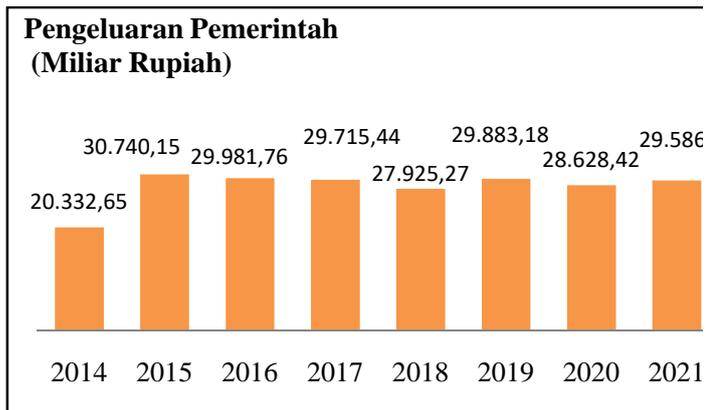
Nilai IPM Provinsi Aceh pada tahun 2016 yaitu 70,00 persen dan pada tahun 2019 yaitu 71,90 persen mulai meningkat dari level sedang menjadi level tinggi pada tahun tersebut, hal ini dikarenakan IPM merepresentasikan bagaimana penduduk suatu kota dapat mengakses hasil pembangunan dengan memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya dengan layak. Akan tetapi pada tahun 2020 nilai IPM Provinsi Aceh menurun menjadi yaitu 71,99 persen yang disebabkan oleh keterbatasan kegiatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 IPM mengalami peningkatan kembali sebesar yaitu 72,18 persen, walaupun hanya tumbuh 0,26 persen akibat mengalami perlambatan yang disebabkan oleh wabah Covid-19, akan tetapi peningkatan IPM Provinsi Aceh sudah kembali membaik pada tahun 2021 hingga saat ini yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita. Hal ini dikarenakan dampak pandemi yang menyebabkan keterbatasan dalam kegiatan ekonomi sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Kondisi puncak pada peningkatan IPM di Provinsi Aceh terjadi pada tahun 2021 sebesar 72,18 persen, dikarenakan pada tahun tersebut Provinsi Aceh baru saja pulih dari pandemi Covid-19, sehingga IPM sepenuhnya semakin membaik, di mana pada tahun tersebut peningkatan IPM tidak terlalu tinggi dikarenakan Provinsi Aceh sedang membenahi pertumbuhannya yang menurun drastis akibat pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan oleh adanya pembenahan ekonomi dimulai dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kembali pengeluaran pemerintah dan lainnya.

Selain IPM, pengeluaran pemerintah menjadi hal yang juga penting dengan peran pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Salah satu upaya pemerintah Pemerintah yaitu dengan melakukan investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia melalui pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah tersebut digunakan untuk membiayai sektor publik untuk menunjang kualitas dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi menjadi peningkatan dalam kualitas sumber daya

manusia agardapat meningkatkan IPM Baeti (2013).

Menurut data BPS Provinsi Aceh berikut ini adalah pengeluaran pemerintah di Provinsi Aceh Tahun 2014-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

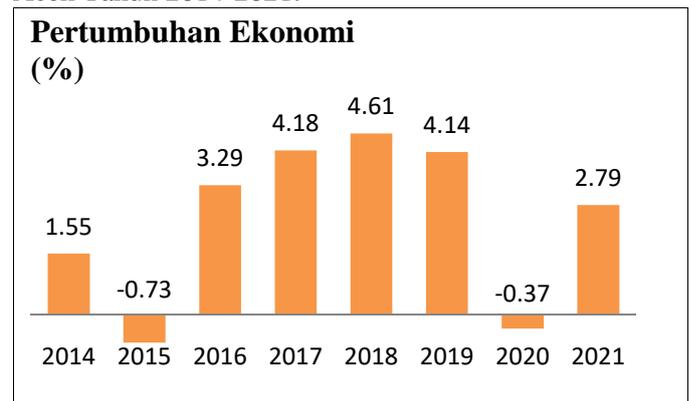
Gambar 1.2 Pengeluaran Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2014-2021 (Miliar Rupiah)

Pengeluaran pemerintah di Provinsi Aceh tahun 2014-2022 mengalami fluktuasi, Pengeluaran pemerintah terendah pada tahun 2014, 2016, 2017 dan juga 2018 sebesar Rp20,332 triliun sampai Rp27,925 triliun, artinya pada tahun tersebut rendah nya pengeluaran pemerintah disebabkan oleh sedikitnya pendapatan pemerintah pusat sehingga berpengaruh terhadap transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Keterbatasan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan, dan pendapatan yang rendah sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Pada tahun 2015 pengeluaran pemerintah meningkat yaitu terjadi sebesar Rp30,740 triliun, yang pada saat itu adanya transfer yang cukup besar di berikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah dari masyarakat penerima layanan, hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran pemerintah pada tahun 2020 juga mengalami penurunan kembali sebesar Rp28,628 triliun dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 sebesar Rp29,586 triliun disebabkan oleh realisasi dalam pencegahan dan subsidi akibat wabah Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

Selain dari pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang juga penting untuk meningkatkan pembangunan manusia suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu masalah jangka panjang yang harus dilakukan oleh setiap daerah. Di mana sangat diharapkan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Setiap daerah mempunyai tujuan yang sama yaitu bagaimana cara untuk mempercepat pertumbuhannya. Pemerintah juga diharapkan mampu memberikan stimulus positif terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Ekonomi adalah

hal yang sering dikaitkan dengan pembangunan manusia. Kondisi ekonomi yang tinggi adalah sasaran dalam pembangunan (Arfiyansyah, 2018). Menurut data BPS Provinsi Aceh berikut ini adalah Pertumbuhan ekonomi di Aceh Tahun 2014-2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh Tahun 2014-2021 (Persen)

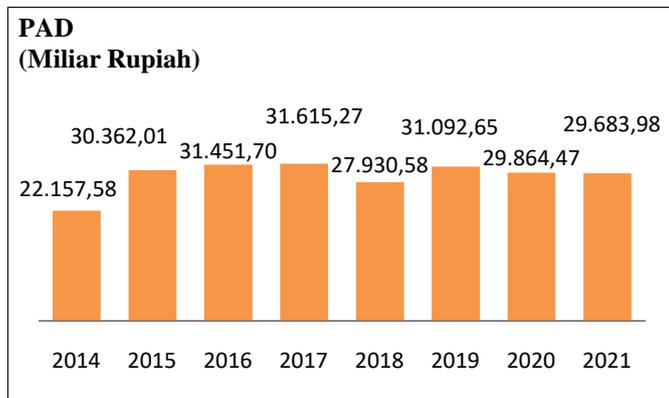
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan dalam 8 tahun terakhir di kabupaten/kota di Provinsi Aceh cenderung tidak stabil dari tahun 2014 sampai tahun 2021. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sekitar 1.55 persen namun pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi yaitu -0,73 persen, artinya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun sebelumnya yang disebabkan karena menurunnya produksi migas baik di pertambangan maupun industri pada Provinsi Aceh. Di mana, penurunan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh komponen ekspor luar negeri yang tumbuh minus hingga mencapai 64,57 persen. Menurunnya ekspor luar negeri terjadi pada ekspor barang hingga minus 71,77 persen, sedangkan ekspor di bidang jasa tumbuh sebesar 5,65 persen. Minusnya ekspor barang tersebut terkait dengan tidak lagi beroperasinya PT Arun NGL yang memproduksi migas, baik *Condensate* maupun *Liquid Natural Gas (LNG)*.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 juga mengalami penurunan yang drastis yaitu sebesar -0,37 persen, hal ini disebabkan oleh adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan pemberhentian berskala besar. Pembatasan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh mengalami penurunan dan berdampak kepada penurunan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan penelitian Barus et al, (2021) yang menyatakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi sangat berdampak pada IPM.

Pertumbuhan ekonomi kembali membaik pada tahun 2016 sebesar 3.29 persen yang salah satunya disebabkan oleh banyaknya proyek pembangunan multiyears yang dikerjakan di Provinsi Aceh selama tahun 2016, dan mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 4,61 persen yang disebabkan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik dalam beberapa tahun. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 2,79 persen sehingga membuat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh menjadi lebih baik. Peningkatan pertumbuhan tersebut terjadinya diakibatkan Provinsi Aceh sedang dalam tahap pemulihan pasca pandemi, sehingga segala macam akses kegiatan ekonomi mulai aktif kembali.

Dalam menjalankan roda pemerintahan Provinsi

Aceh memiliki hak istimewa dalam mengalokasikan ide desentralisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka desentralisasi fiskal merupakan strategi kebijakan pemerintah yang sangat penting bagi pembangunan manusia terutama dalam keikutsertaannya untuk meningkatkan IPM. (Rusydi et al., 2022). Untuk melihat tingkat desentralisasi fiskal tersebut yaitu dengan adanya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola oleh pemerintah daerah (Munir, 2004). Menurut data BPS Provinsi Aceh berikut ini adalah PAD di Aceh Tahun 2014-2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022

Gambar 1.4 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Aceh Tahun 2014-2021 (Miliar Rupiah)

PAD Provinsi Aceh mengalami fluktuasi pada 8 tahun terakhir yang di mana penerimaan PAD pada kondisi puncak terjadi pada tahun 2017 yaitu Rp31,615 triliun di mana pertumbuhan ini dipengaruhi oleh kenaikan yang melebihi target penerimaan PAD Pemerintah Provinsi Aceh sebesar 15,59 persen pada beberapa kabupaten/kota yang melebihi target penerimaan salah satunya adalah kota Banda Aceh, kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu Rp27,930 triliun yang mana penerimaan PAD pada beberapa daerah tidak dapat memenuhi target dalam penerimaan PAD. Lalu pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp31,092 triliun, peningkatan tersebut di sebabkan oleh adanya pergerakan kegiatan ekonomi yang lebih baik. Pada tahun 2019-2021 terus mengalami penurunan sebesar Rp29,683 triliun, hal ini disebabkan oleh tingginya desentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat.

Terdapat sejumlah penelitian terkait dengan Indeks Pembangunan Manusia yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian Sinuraya (2019) menghasilkan temuan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Timur. Penelitian Godfrey (2013) menunjukkan bahwa pengeluaran akhir pemerintah, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan ekspor neto berpengaruh positif signifikan terhadap IPM di Uganda, kecuali pengeluaran investasi yang tidak signifikan. Penelitian Iba (2016) membuktikan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap IPM di Aceh. Penelitian Saputra (2013) menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi namun

desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk melakukan kajian mengenai “Pengaruh pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh”.

2. TINJAUAN TEORITIS IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) dibuat dan dipopulerkan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1996 dalam seri laporan tahunan yang diberi judul “*Human Development Report*” Indeks ini disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif untuk menilai keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara selain pendapatan nasional perkapita (Alison, 2017).

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam usaha membangun kualitas hidup manusia yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk mampu mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendidikan (harapan lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) serta pendapatan atau standar hidup layak (ekonomi) (BPS, 2015).

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen dalam struktur *Produk Nasional Bruto* (PNB) dalam sebuah pemerintah akan melakukan pengeluaran atau pembelian agar operasional dan roda perekonomian tetap berjalan (Hasanah & Sunyoto D, 2018). Menurut Baswir, secara umum anggaran pemerintah dapat diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijaksanaan untuk suatu periode atau periode dimasa yang akan datang. Berdasarkan struktur anggaran yang dipakai sekarang, maka anggaran pemerintah daerah dinamakan anggaran terpilih. Struktur anggaran pemerintah, dalam sistem anggaran di Indonesia dikenal dua macam pengeluaran pemerintah yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk operasionalisasi pemerintah seperti halnya untuk pembayaran gaji pegawai dan lainnya. Sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang dikategorikan sebagai pengeluaran untuk investasi pemerintah, diantaranya investasi disektor publik (Sinulingga, 2013).

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Arifin (2021) perekonomian diartikan sebagai jumlah barang dan jasa meningkat apabila mengalami pertumbuhan ekonomi. Mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai produk domestik bruto (PDB) yang digunakan PDB berdasarkan harga konstan. Oleh karena itu dengan menggunakan harga konstan maka pengaruh perubahan harga telah dihilangkan, sehingga sekalipun angka yang muncul merupakan nilai uang dari total output barang dan jasa, perubahan nilai PDB sekaligus menunjukkan perubahan jumlah kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan selama periode pengamatan. Ketika sulitnya mengumpulkan data PDB, maka penghitungan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilakukan setiap saat.

Teori ekonomi klasik pertumbuhan ekonomi di pengaruhi oleh empat faktor yaitu jumlah penduduk, stok barang modal, luas tanah dan kekayaan penduduk, serta kemajuan teknologi. Menurut teori ini yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah penambahan penduduk karena bertambahnya jumlah penduduk akan memperluas pasar, perluasan membuat tingkat saingan sumber daya semakin tinggi yang akan meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi. Pertambahan penduduk yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Alkhoiriyah & Sa'roni, 2021).

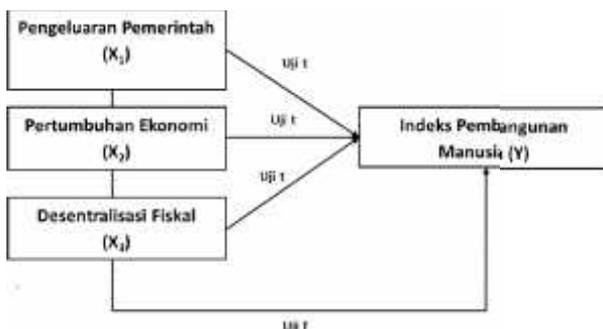
Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan suatu pelimpahan wewenang dalam melaksanakan prinsip *money should follow function* merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan derivatif dari kebijakan otonomi daerah sebagai pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari pusat ke daerah.

Menurut Mardiasmo (2006) pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Oleh sebab itu untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal salah satunya ialah dapat dilihat melalui jumlah pendapatan asli daerahnya (PAD) sebagai kontribusi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan ide desentralisasi.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka konsep yang menjelaskan hubungan antar variabel bebas dan terikat yang dapat diamati dalam suatu penelitian. Berikut kerangka hubungan antar variabel dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Diduga pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh.
- H₂: Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh.
- H₃: Diduga desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif karena data yang digunakan dalam penelitian merupakan data berbentuk angka. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data gabungan *time series* dan *Cross section* yang diambil dari periode tahun 2014 hingga tahun 2021. Data-data tersebut diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik).

Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dengan metode kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengutip langsung data tersebut dari jurnal-jurnal, buku, serta media informasi lainnya yang dipublikasikan oleh suatu instansi secara resmi dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

Definisi Operasional

Variabel terikat

1. Indeks Pembangunan Manusia (Y)

Indeks Pembangunan manusia (IPM) merupakan data yang diambil dari angka Indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh pada tahun 2014-2021 yang diukur dengan satuan persen.

Variabel bebas

1. Pengeluaran Pemerintah (X1)

Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah yang terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2014-2021 dengan satuan rupiah.

2. Pertumbuhan Ekonomi (X2)

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada tahun 2014 - 2021 dengan satuan persen.

3. Desentralisasi Fiskal (X3)

Desentralisasi fiskal merupakan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan desentralisasi keuangan yang direpresentasikan oleh PAD seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh dengan satuan rupiah.

Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengolah data yang telah terkumpul kemudian dapat memberikan interpretasi pada hasil-hasil tersebut. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel.

Metode Regresi Data Panel

Menurut Gujarati (2009), data panel (*pooled data*) atau yang disebut juga data *longitudinal* merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu sedangkan data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisis empiris yang tidak mungkin dilakukan jika hanya menggunakan data *time series* atau *cross section*. Data *times series* pada penelitian ini adalah periode waktu penelitian yaitu 8 tahun (2014-2021).

Persamaan model dengan menggunakan regresi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 \text{LogPP}_{it} + \beta_2 \text{PE}_{it} + \beta_3 \text{LogP}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana:

| | |
|-----------------------------|--|
| IPM | = Indeks Pembangunan Manusia |
| PP | = Pengeluaran Pemerintah |
| PE | = Pertumbuhan Ekonomi |
| PAD | =Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal) |
| | =Konstanta |
| $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ | = Koefisien regresi |
| Log | = Logaritma |
| i | = <i>Cross section</i> |
| t | = <i>Timeseries</i> |
| | = <i>ErrorTerm</i> |

Data-data yang digunakan dalam variabel-variabel yang ada di atas tersebut berjumlah 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat dengan menggunakan data dari tahun 2014-2021. Untuk mengukur pengaruh antara variabel digunakan beberapa langkah pengujian yaitu menentukan metode estimasi model.

Estimasi Model Regresi Data Panel

Menurut Gujarati, (2009) estimasi model yang menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu metode kuadrat terkecil (*pooled least square*), metode efek tetap (*fixed effect model*) dan metode efek random (*random effect model*). Ketiga model pendekatan dalam analisis data panel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Common Effect Model (CEM)

Model kuadrat terkecil biasa diterapkan dalam pendekatan yang paling sederhana yang disebut estimasi CEM atau *pooled least square* dalam pengolahan data panel. Misalkan terdapat persamaan berikut ini (Gujarati, 2009):

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} \text{ untuk } i = 1, 2, \dots, N \text{ dan } t = 1, 2, \dots, T$$

Merupakan pendekatan di mana N adalah jumlah unit *cross section* (individu) dan T adalah jumlah periode waktunya. Dengan mengasumsikan komponen *error* dalam pengolahan kuadrat terkecil biasa, kita dapat melakukan proses estimasi secara terpisah untuk setiap unit *cross section*. Untuk periode $t = 1$, akan diperoleh persamaan regresi *cross section* sebagai berikut.

$$Y_{i1} = \alpha + \beta X_{i1} + \varepsilon_{i1} \text{ untuk } i = 1, 2, \dots, N$$

Yang akan berimplikasi diperoleh sebanyak T

persamaan yang sama. Begitu juga sebaliknya, kita juga akan dapat memperoleh persamaan deret waktu (*time series*) sebanyak N persamaan untuk setiap T observasi dengan dan konstan sehingga akan diperoleh dalam bentuk regresi yang lebih besar dengan melibatkan sebanyak NT observasi. Akan tetapi dengan demikian tidak dapat melihat perbedaan antar individu maupun antar waktu.

b. Fixed Effect Model (FEM)

Masalah terbesar dalam pendekatan metode *pooled least square* adalah asumsi intersep dan slope dari persamaan regresi yang dianggap konstan baik antar individu maupun antar waktu yang mungkin tidak beralasan. *Generalisasi* secara umum sering dilakukan adalah dengan memasukan variabel boneka (*dummy variable*) untuk menghasilkan nilai parameter yang berbeda-beda baik lintas unit *cross section* maupun antar waktu.

Pada model *fixed effect*, estimasi dapat dilakukan tanpa pembobot (*no weighted*) atau *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) dan dengan pembobotan (*cross section weight*) atau *General Least Square* (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross section* (Gujarati, 2009).

c. Random Effect Model (REM)

Keputusan untuk memasukkan variabel model efek tetap memiliki konsekuensi berkurangnya *degree of freedom* yang akhirnya dapat mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Oleh karena itu, dalam model data panel dikenal pendekatan yang ketiga yaitu model efek acak.

Dengan menggunakan model efek acak, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan oleh model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter akan menjadi semakin efisien (Gujarati, 2009).

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat/sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tahapan uji (*test*) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu: Uji Chow dan Uji Hausman.

Uji Chow

Uji Chow bertujuan untuk menguji/membandingkan atau memilih model manayang terbaik apakah model *Common Effect* atau *Fixed Effect* yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Uji Chow adalah sebagai berikut:

- 1) Estimasi dengan *Fixed Effect*
- 2) Uji dengan menggunakan *Chow-test*
- 3) Melihat nilai *probability F* dan *Chi-square* dengan asumsi:
 - a. Bila nilai *probability F* dan *Chi-square* $> = 5\%$, maka uji regresi panel data menggunakan model *Common Effect*.
 - b. Bila nilai *probability F* dan *Chi-square* $< = 5\%$, maka uji regresi panel data menggunakan model *Fixed Effect*

Atau pengujian uji F ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect* (CE), di mana F hitung $< F$ tabel atau nilai prob. $F > 0,05$

H_1 : *Fixed Effect Model*, di mana F hitung $> F$ tabel atau nilai

prob. $F < 0,05$

Uji F dilakukan dengan memperhatikan nilai probabilitas (Prob.) untuk *Cross-section* F. Jika nilainya $> 0,05$ (ditentukan diawal sebagai tingkat signifikansi atau alpha) maka model yang terpilih adalah CE, tetapi jika $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah FEM. Bila berdasarkan Uji Chow model yang terpilih adalah CEM, maka langsung dilakukan ujiregresi data panel. Tetapi bila yang terpilih adalah model FEM, maka dilakukan Uji Hausman untuk menentukan antara model FEM atau REM yang akan dilakukan untuk melakukan uji regresi data panel.

Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara FEM dan REM yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Langkah-langkah yang dilakukan dalam Uji Hausman adalah sebagai berikut:

- 1) Estimasi dengan *Random Effect*
- 2) Uji dengan menggunakan *Hausman-test*
- 3) Melihat nilai *probability F* dan *Chi-square* dengan asumsi:
 - a. Bila nilai *probability F* dan *Chi-square* $> = 5\%$, maka uji regresi panel data menggunakan model REM
 - b. Bila nilai *probability F* dan *Chi-square* $< = 5\%$, maka uji regresi panel data menggunakan model FEM

Atau dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*, di mana *probability F* dan *Chi-square* $> = 5\%$

H_1 : *Fixed Effect Model*, di mana *probability F* dan *Chi-square* $< = 5\%$

H_0 ditolak jika *P-value* lebih kecil dari nilai α . H_0 diterima jika *P-value* lebih besar dari nilai α . Nilai α yang digunakan adalah 5%. Uji Hausman dilihat menggunakan nilai probabilitas dari *crosssection random effect* model. Jika nilai probabilitas dalam Uji Hausman lebih kecil dari 5% maka H_0 ditolak yang berarti bahwa model yang cocok digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah model *fixed effect*. Dan sebaliknya jika nilai probabilitas dalam uji Hausman lebih besar dari 5% maka H_0 diterima yang berarti bahwa model yang cocok digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah model *random effect*.

Uji Lagrange Multiplier (LM)

Untuk mengetahui apakah model *Random Effect* lebih baik dari pada metode *Common Effect* (OLS) digunakan uji *The Breusch-Pagan LM Test* di mana menggunakan hipotesis sebagai berikut (Ghozali dan Ratmono, 2017):

H_0 : model *common effect*, di mana *probability F* dan *Chi-square* $< = 5\%$

H_a : model *random effect*, di mana *probability F* dan *Chi-square* $> = 5\%$

Dasar penolakan H_0 menggunakan statistik LM yang berdasarkan nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas $>$ dari 0,05 maka tolak H_0 , sehingga model yang lebih sesuai dalam menjelaskan permodelan data panel tersebut adalah REM, begitu pula sebaliknya. Jika

nilai probabilitas $<$ dari 0,05 maka H_0 diterima, sehingga model yang lebih sesuai dalam menjelaskan permodelan data panel tersebut adalah CEM.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui hubungan diantara variabel-variabel bebas dalam penelitian, digunakan uji multikolinearitas. Ghozali mengatakan bahwa uji ini bertujuan menguji apakah pada model ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi (Gujarati & Porter, 2009). Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas dalam suatu model regresi dilihat dengan me-regres model dengan log residu kuadrat sebagai variabel terikat. Apabila, probabilitas dari masing-masing variabel bebas lebih dari 0,05 maka tidak terjadi multikolinearitas. Sebaiknya, probabilitas dari masing-masing variabel bebas lebih kecil dari 0,05 maka terjadi multikolinearitas (Gujarati, 2014).

Uji Heteroskedastisitas

Dalam uji klasik ada yang dinamakan uji heteroskedastisitas. Menurut Ghozali uji heteroskedastisitas bertujuan menguji model terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu ke pengamatan yang lain atau tidak. Model yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas itu dengan menggunakan Uji Harvey (*Harvey Test*).

Dasar dalam mengambil keputusan dari uji heteroskedastisitas melalui Uji Harvey (*Harvey Test*) dilakukan sebagai berikut (Gujarati & Porter, 2009).

1. Jika probabilitas $> 5\%$, maka variabel-variabel tersebut tidak terdapat heteroskedastisitas.
2. Jika probabilitas $< 5\%$, maka variabel-variabel tersebut terdapat heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji -t (Uji Parsial)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2015). Apabila nilai T hitung $>$ T tabel atau nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y secara parsial.

Uji -F (Uji Simultan)

Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Apabila nilai F hitung $>$ F tabel atau nilai signifikansi $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini melihat berapa proporsi variasi dari variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel tidak bebas (Gujarati, 2014), dengan formula:

$$R^2 = \frac{II}{III}$$

Dimana:

JK_R = jumlah kuadrat regresi (*explained sum of squares*).

Nilai koefisien determinasi merupakan kuadrat dari nilai korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat dalam bentuk persentase, sehingga nilai koefisien determinasi antara 0% sampai 100%. Rumus koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = koefisien determinasi

R^2 = nilai koefisien korelasi yang dikuadratkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan Teknik Estimasi Data Panel

Dalam melakukan regresi data panel maka ada terdapat tiga jenis model yang bisa digunakan dalam regresi data yaitu *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Maka untuk bisa memilih model mana yang tepat untuk digunakan perlu adanya dilakukan uji chow dan uji hausman. Berikut merupakan hasil pengujian dalam pemilihan model yang tepat yaitu:

Uji Chow

Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat. Jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi = 5%, maka model yang tepat untuk digunakan adalah *Common Effect* dan apabila nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi = 5%, maka model yang tepat untuk digunakan adalah *Fixed Effect*. Hipotesis dalam uji chow adalah:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Dari hasil estimasi uji Chow yang telah dilakukan dengan menggunakan *Redundant Fixed effect – Likelihood Ratio* didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Chow

| Effects Test | Statistic | d.f. | Prob. |
|--------------------------|------------|----------|--------|
| Cross-section F | 74.424605 | (22,158) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 447.185392 | 22 | 0.0000 |

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan hasil Uji Chow pada tabel diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0000 di mana nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi = 5% (0.0000 < 0,05). Maka model panel yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect*.

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Jika nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi = 5%, maka model yang tepat untuk digunakan adalah *Random Effect Model* dan apabila nilai probabilitas F-statistik lebih kecil dari

tingkat signifikansi = 5%, maka model yang tepat untuk digunakan adalah *Fixed Effect*. Hipotesis adalah:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *Fixed Effect Model*

Dari hasil estimasi uji hausman yang telah dilakukan dengan menggunakan *Correlated Random Effects – Hausman Test* didapatkan hasil sebagaiberikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Hausman

| Test Summary | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob. |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 18.870611 | 3 | 0.0003 |

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan hasil Uji Hausman pada tabel diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0032 di mana nilai probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi = 5% (0.000 < 0,05). Maka model panel yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model*. Selanjutnya tidak perlu untuk melanjutkan pengujian *Lagrange Multiplier*.

Uji Asumsi Klasik

Karena telah terpilih model *Fixed Effect Model* (FEM) pendekatan OLS pada regresi data panel, jadi uji normalitas dan uji autokorelasi tidak perlu dilakukan. Uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel independen lainnya. Untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya gejala Multikolinieritas dapat dilihat dari besarnya koefisien korelasi masing-masing variabel independen. Jika nilai koefisien korelasi parsial variabel lebih besar dari 0.80 maka terjadi gejala Multikolinieritas, dan begitu sebaliknya (Gujarati & Porter, 2009). Berikut adalah hasil pengujian Multikolinieritas dalam penelitian ini.

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas

| | LOGPP | PE | LOGDF |
|--------|----------|----------|----------|
| LOGPP | 1 | 0.025025 | 0.500628 |
| PE | 0.025025 | 1 | 0.131893 |
| LOGPAD | 0.500628 | 0.131893 | 1 |

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai pertumbuhan ekonomi dengan pengeluaran pemerintah korelasi sebesar 0.025 < 0.80, ini menandakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas. Nilai PAD dengan pertumbuhan ekonomi korelasi sebesar 0.50 < 0.80, ini menandakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas. Nilai pengeluaran pemerintah dengan PAD korelasi sebesar 0.13 < 0.80, ini menandakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas dilihat dari masing-masing variabel bebas bahwa tidak adanya gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *TR Period Test*. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak artinya ada masalah heteroskedastisitas.
- Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 67.46435 | 0.416170 | 162.1076 | 0.0000 |
| LOGPP | 2.75E-11 | 3.55E-10 | 0.077581 | 0.9382 |
| PE | -0.000971 | 0.064073 | -0.015154 | 0.9879 |
| LOGPAD | 1.11E-08 | 2.82E-09 | 3.935600 | 0.0001 |

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan hasil pada tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa probabilitas variabel pengeluaran pemerintah sebesar 0,9382, pertumbuhan ekonomi dengan nilai probabilitas 0.9879 berada di atas (>0.05) maka variabel pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi terbebas dari heteroskedastisitas. Sedangkan PAD dengan nilai probabilitas 0.0001 berada di bawah (<0.05), maka variabel PAD mengalami heteroskedastisitas.

Analisis Data Panel

Dari hasil uji-Chow dan uji Hausman, maka didapatkan model terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model. Hasil regresi Fixed Effect Model yang merupakan model yang terpilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Fixed Effect Model

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C | 68.66139 | 0.455831 | 150.6289 | 0.0000 |
| LOGPP | 4.450010 | 2.810010 | 1.586036 | 0.1147 |
| PE | -0.002980 | 0.036713 | -0.081161 | 0.9354 |
| LOGPAD | 7.870009 | 2.820009 | 2.787311 | 0.0060 |

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 di atas maka dapat diperoleh persamaan hasil regresi sebagai berikut:

$$IF_{it} = 68,661 + 4,450 \text{Log} P_{it} - 0,003 \text{Log} P_{it} + 7,870 \text{Log} P_{it}$$

Dari hasil persamaan regresi 3.2 di atas, maka nilai konstanta sebesar 68,661 menunjukkan jika pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan PAD bernilai konstan atau nol, maka nilai IPM di Provinsi Aceh sebesar 68,661%.

Nilai koefisien variabel pengeluaran pemerintah sebesar 4,450 artinya apabila pengeluaran pemerintah

meningkat sebesar 1 persen, maka IPM di Provinsi Aceh mengalami peningkatan sebesar 4,450 persen. Nilai koefisien variabel pertumbuhan ekonomi -0,003, artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen, maka IPM di Provinsi Aceh akan menurun sebesar 0,003 persen. Nilai koefisien variabel PAD 7,871, artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkat 1 persen, maka IPM di Provinsi Aceh akan mengalami peningkatan sebesar 7,871 persen.

Uji Hipotesis

Uji-t (Uji Parsial)

Uji Parsial dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara individu antara variabel independen terhadap variabel dependen. Ketentuan uji t yaitu dengan melihat nilai t tabel dengan t statistik. Apabila nilai t statistik $> t$ tabel dan probabilitas dibawah ($< \alpha$) maka variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen (Gujarati & Porter, 2009).

Tabel 4.6
Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

| Variabel Bebas | t-Statistic | t-Tabel | | | Prob | Ket |
|----------------|-------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------|------------------------------------|
| | | 1% ($\alpha = 0.01$) | 5% ($\alpha = 0.05$) | 10% ($\alpha = 0.10$) | | |
| LOGPP | 1.58603 | 2,347 | 1,973 | 1,654 | 0.114 | Tidak Signifikan |
| PE | -0.08116 | 2,347 | 1,973 | 1,654 | 0.935 | Tidak Signifikan |
| LOGPAD | 2.78731 | 2,347 | 1,973 | 1,654 | 0.006 | Signifikan (pada $\alpha = 0.05$) |

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, maka dapat menjawab hipotesis penelitian sebagai berikut:

Variabel pengeluaran pemerintah memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1.586 < 1,973$) pada level 5% dengan probabilitas $0.1147 > 0,05$ jadi variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh.

Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-0.081 < 1,973$) pada level 5% dengan probabilitas $0.9354 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh.

Variabel PAD memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.787 > 2,347$), pada level 1% dengan probabilitas $0.0060 < 0,01$ sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM di Provinsi Aceh.

Uji-F (Uji Simultan)

Uji simultan (uji F) dilakukan untuk mengetahui variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen yaitu dengan melihat nilai F statistik. Apabila nilai $F_{statistik} > F_{tabel}$ dengan tingkat probabilitas ($< 0,05$) maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berikut hasil pengujian simultan (uji F) pada penelitian ini:

Tabel 4.7
Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji-F)

| F-Statistic | F-Tabel | Alpha | Prob | Ket |
|-------------|---------|-------|----------|------------|
| 77,78163 | 2,65 | 0,05 | 0,000000 | Signifikan |

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 di atas terlihat bahwa secara simultan nilai F-statistik $> F$ -tabel ($77,782 > 2,65$) dengan probabilitas sebesar ($0.000 < 0.05$) sehingga dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat IPM di Provinsi Aceh.

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi atau uji R^2 digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai *Adjusted R-Squared* lebih mendekati nol, hal tersebut berarti hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat sangat lemah. Apabila nilai *Adjusted R-Squared* lebih mendekati satu maka hubungan antar variabel bebas terhadap variabel terikat sangat kuat

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

| | |
|--------------------|----------|
| R-Squared | 0.924853 |
| Adjusted R-squared | 0.912962 |

Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R-Squared* dalam penelitian ini sebesar 0.9129. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan PAD terhadap IPM di Provinsi Aceh, sangat kuat yaitu 91.29 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yaitu sebesar 8,71 persen.

Pembahasan

Model yang terpilih dalam penelitian ini adalah model *Fixed effect*. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dan secara simultan. Maka keterkaitan variabel bebas dengan variabel terikat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap IPM

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh tahun 2014-2021. Artinya apabila pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan maka tidak akan meningkatkan IPM di Provinsi Aceh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang menunjukkan di mana belanja pemerintah bidang pendidikan dan atau kesehatan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pembentukan IPM. Hal ini dapat dilihat pada penelitian Badrudin dan Khasanah (2011), Kahang, et al (2016), serta Hidayati dan Imaningsih (2022). Sejalan juga dengan penelitian Herdial & Jafar (2022) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial

variabel pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh, yang berarti bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dewi (2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian Sania et al., (2021) yang menyimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Jawa Timur. Penelitian ini juga berbanding terbalik dengan penelitian Diba et al., (2018) yang menyimpulkan PDRB mempengaruhi IPM di Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014.

Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap IPM

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD (desentralisasi fiskal) berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh. Artinya apabila desentralisasi fiskal mengalami peningkatan maka akan meningkatkan IPM di Provinsi Aceh, atau sebaliknya apabila desentralisasi fiskal menurun maka IPM di Provinsi Aceh juga menurun.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Fernandes dan Putra (2022) yang menunjukkan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Gorontalo. Peningkatan tersebut disebabkan oleh alokasi PAD telah dimanfaatkan dengan baik sehingga kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Ningrum et al (2020) serta penelitian Pradnyantari dan Dwirandra (2017) yang mengemukakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap IPM di Provinsi Bali.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh, Artinya jika pengeluaran pemerintah meningkat, maka tidak akan meningkatkan IPM di Provinsi Aceh.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh. Artinya peningkatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi tidak akan mempengaruhi IPM di Provinsi Aceh
3. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Aceh, Artinya jika desentralisasi fiskal (melalui kontribusi PAD) meningkat, maka akan dapat meningkatkan IPM di Provinsi Aceh

Saran

Dari kesimpulan di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh hendaknya dapat melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta penciptaan lapangan pekerjaan untuk

- masyarakat, agar dapat meningkatkan IPM di kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
2. Pemerintah di Provinsi Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan PAD dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif (keamanan, perizinan, insentif, dll), dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 3. Peneliti-peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini agar dapat menambah variabel dan jumlah data, serta menggunakan alat analisis data lainnya, sehingga hasil penelitian selanjutnya menjadi lebih baik.
- Daftar Pustaka**
- Arfiyansyah, S. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 270–283. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.77>
- Arifin. (2021) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018. *Jurnal Ekonomidan Perbankan Syariah*(Vol. 8 No. 1).
- Alkhoiriyah,S., Fitri & Sa'roni, C. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pngangguranterhadap pertumbuhan ekonomi di kota Banjarmasin. *JurnalIlmu Ekonomi dan Pembangunan* (Vol. 4)
- Alison J, L, H, (2017).*Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Dan Bidang Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara*, JurbahBerkala Ilmiah Efisiensi Vol. 17 No. 1
- Baeti, N. (2013). Pengaruh pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3).
- Badrudin, R. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. *Universitas Airlangga Surabaya*, 335.
- Badrudin, R., & Khasanah, M. (2011). Pengaruh pendapatan dan belanja daerah terhadap pembangunan manusia di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Buletin Ekonomi*, Vol. 9 (No. 1), 1-82.
- Barus, Y. Y., Sinaga, R. V., & Sagala, R. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga Dan Lokasi Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus Pada Milala Service Station Medan). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 20, 141–150.
- Dewi, N., Yusbar ,Y., Rita , Y, I. (2017) "Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, vol. 4, no. 1, Feb. 2017, pp. 870-882.
- Ghozali, I. (2012). *Aplikasi Analisis Multivariant dengan program IBM SPSS*.
- Ginting, K, C. (2008). Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia. *Tesis*, Sekolah Pascasarjana, Magister Ekonomi Pembangunan. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Guritno.(2001). *Ekonomi Pubilk*. Edisi 3. Yogyakarta: BPFE.
- Gujarati. (2014). *Dasar-Dasar-Ekonometrika.Pdf*.
- Gujarati, && Porter. (2009). *Basic Econometrics*.
- Godfrey, B. (2013). *The Effect Of Gross Domestic Product On The Human Development Index In Developing Countries. A Case Study Of Uganda*. *Academia.edu*.
- Handika, F. R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di kabupaten malang. *Jurnal ilmiah*.
- Hasanah E, U & Sunyoto D .(2018), *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: CAPS,.) hlm. 35.
- Hidayati,D. R dan Imaningsih, N. (2022). *Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya.
- Herdial, & Jafar, R. 2022. “Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Selatan”. *ICOR: Journal of Regional Economics* 3 (1), 53-65. <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/icor/article/view/34415>.
- Irianto, I., Kisnawati, B., Istiarto, I., & Helmida, B. E. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Ganec Swara*, 15(2), 1258. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i2.244>
- Iba, Z. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Kebangsaan*. Vol 5. No

10.

Malang : CV IRDH.

- Kahang, M. Saleh. M., Suharto. R. B. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indkes Pembangunan Manusia di Kabupaten Kutai Timur." *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, vol. 18, no. 2, 2016, pp. 130-140, doi:10.1505/jfor.v18i2.863.
- Mardiasmo, (2006). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Munir, D. (2004) Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta, YPAPI.
- Nugroho, G. A. (2016). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indonesian Treasury Review. *Indonesia Treasury Review*, 1(1), 39–50. www.djpk.kemenkeu.go.id
- Pradnyantari, P. M., & Dwirandra, A. A. N. B. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada IPM dengan Variabel Pemoderasi Dana Alokasi Umum. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(1), 536–564.
- Rusydi, B, U., Maulia, C, N., & Hasbiullah. (2022). Bulletin of Economic Studies (BEST) Provinsi Sulawesi Selatan The Effect Of Fiscal Decentralization On Human Development Index In Region / City Of South Sulawesi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai h. 0.
- Setyowati & Suparwati. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Empiri pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah). *Jurnal Prestasi*. Vol. 9 No. 1.
- Sinuraya, R, E, M. (2019). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2014-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol 8. No 2.
- Saputra, B. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (*The Impact Of Fiscal Decentralization On Economic Growth And Social Welfare*). *Jurnal Borneo Administrator*, 9 (1).
- Sasti, I. A. T. P., & Latrini, M. Y. (2019). Pengaruh Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1632. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p29
- Susanti, D.S. (2019). *Analisis Regresi dan Korelasi*.
- Sinulingga, S. (2013). *Metode Penelitian*. Medan: USU Press
- Todaro, M. P., & Steven, S. C. (2006). *Economics Development 12th Edition*. New Jersey: Pearson
- Todoro, M. P. & Semith, S. C 2003 *Economic Develomen, Eighth Edition*. PT.Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Untoro, Joko. (2010). *Ekonomi*. Jakarta: Kawah Media.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.